



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4 Jakarta
Telpon : 3811679 - 34833004 - 34833005
JAKARTA 10710

Nomor : B.V/1/HK.00.4/125.11 /2014
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Perihal : Penyampaian Salinan KMA

Jakarta, 30 Juni 2014

Kepada
Yth. Kepala Pusat Informasi
Dan Hubungan Masyarakat
Kementerian Agama RI
Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan fotokopi Keputusan Menteri Agama Nomor 98 tahun 2014 tentang Penetapan Akun Media Sosial Kementerian Agama, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan bantuan Saudara kami ucapkan terima kasih.

Wassalam,
a.n. Kepala Biro Hukum dan KLN
Kabag Perancangan Peraturan
Perundang-undangan



Iman Syaukani, S.Ag, MH
Nip. 197112142000031002

Tembusan
Kepala Biro Hukum dan KLN



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 98 TAHUN 2014
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Agama, perlu dibentuk akun media sosial Kementerian Agama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Akun Media Sosial Kementerian Agama;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 200 Tahun 2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL KEMENTERIAN AGAMA.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Kementerian Agama sebagai berikut:

1. Twitter : @Kemenag_RI
2. *Fan page* Facebook : Kementerian Agama RI
3. Youtube : Kementerian Agama

KEDUA : Akun Media Sosial Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat.

KETIGA : Akun media sosial digunakan sebagai media sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Kementerian Agama.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Agama.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2014



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN